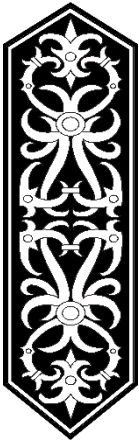




LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA**

**Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2020**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Yang kemudian Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, bahwa rincian tugas, fungsi dan tata kerja diatur dengan Peraturan Gubernur, sehingga dikeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Laporan Kinerja merupakan wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, serta sebagai umpan

balik untuk perbaikan kinerja pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Ukuran keberhasilan kinerja dilihat dari sejauh mana sasaran-sasaran tersebut tercapai. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil pencapaian tersebut yang dituangkan ke dalam suatu laporan yang disebut Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan kinerjanya dan mempertanggungjawabkan tujuan dan sasaran serta rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra, Rencana Kinerja Tahun 2020 dan Penetapan Kinerja Tahun 2020. Laporan Kinerja ini juga dapat dijadikan sebagai *feedback* yang berharga dalam memperbaiki kinerja di masa mendatang.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, maka tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan fungsi :

1. Formula kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. fasilitasi, advokasi dan sosialisasi kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana.
4. peformulaan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengarusutaman gender dan Pemberdayaan Perempuan.
5. peformulaan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
6. peformulaan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi perlindungan dan tumbuh kembang anak;
7. peformulaan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengendalian penduduk;
8. peformulaan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
9. peformulaan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
10. peformulaan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi penyusunan informasi data;
11. pengelolaan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya ;
12. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan tanggungjawab.
13. pelaksanaan koordinasi pada dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

mulai bergeser pada fungsi pelayanan dengan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak di Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, mempunyai wewenang sebagai berikut

:

1. Penetapan kebijakan daerah, koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) skala provinsi ;
2. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala provinsi ;
3. Penyelenggaraan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan skala provinsi ;
4. Fasilitasi pengintegrasian kebijakan perlindungan perempuan terhadap kekerasan, tenaga kerja, perempuan lansia, perempuan penyandang cacat dan perempuan di daerah konflik skala provinsi ;
5. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah terhadap kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi ;
6. Fasilitasi pengembangan dan penguatan lembaga atau organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi ;
7. Koordinasi pelaksanaan sistem informasi gender dan anak skala provinsi;
8. Kompilasi data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala provinsi menyangkut komunikasi, informasi dan edukasi (KIE);
9. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup Ibu, Bayi dan Anak skala provinsi ;
10. Penetapan kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala provinsi ;
11. Penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala provinsi ;

12. Penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala provinsi ;
13. Penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) skala provinsi.
14. Penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga berencana ;
15. Pelaksanaan kebijakan terpadu antara perkembangan penduduk (aspek kualitas, kuantitas dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan; dan
16. Penyerasian kebijakan kependudukan.
17. Melaksanakan fungsi Pelayanan dan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Tengah.

C. Aspek Strategis

Berdasarkan komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, permasalahan serta isu strategis Provinsi Kalimantan Tengah yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, serta keselarasan dengan sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah, maka untuk memajukan Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan visi *"Kalimantan Tengah Maju, Mandiri Dan Adil Untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah Berkah (Bermartabat, Elok, Religious, Kuat Amanah Dan Harmonis)"*. Dengan visi tersebut dijabarkan misi sebagai berikut :

1. Pemantapan tata ruang wilayah Provinsi
2. Pengelolaan Infrastruktur
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir dan Pantai
4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan
5. Pemantapan tata kelola pemerintah daerah
6. Peningkatan Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata
7. Pengelolaan Lingkungan hidup dan Sumber daya alam
8. Pengelolaan Pendapatan daerah

Berdasarkan Visi dan Misi pemerintah daerah tersebut, Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan amanat untuk melaksanakan program-program pemerintah daerah yang merupakan penjabaran dari misi ke enam "Peningkatan Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata" dengan tujuan Meningkatkan Kualitas sumberdaya manusia. Selain itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana juga mendukung keseluruhan kegiatan prioritas lainnya dalam upaya peningkatan pelayanan di berbagai sektor.

D. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, maka susunan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, adalah sebagai berikut :

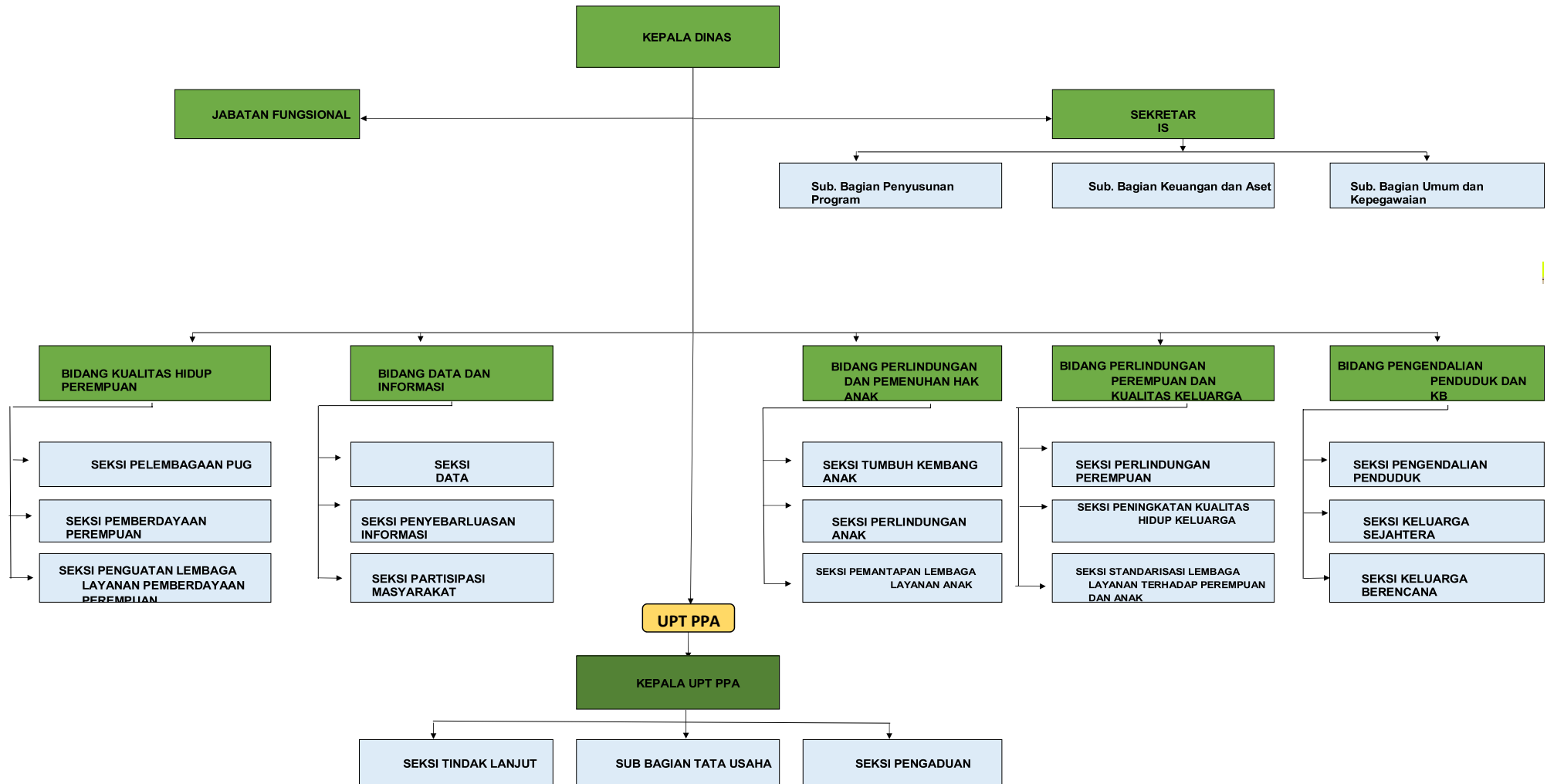
1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah ;
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Program;
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Kepala Bidang, terdiri dari :
 - a. Bidang Kualitas Hidup Perempuan, membawahi :
 - 1) Kepala Seksi Pelembagaan PUG
 - 2) Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan
 - 3) Kepala Seksi Penguatan Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan.
 - b. Bidang Data dan Informasi, membawahi :
 - 1) Kepala Seksi Data

- 2) Kepala Seksi Penyebarluasan Informasi
- 3) Kepala Seksi Partisipasi Masyarakat
- c. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, membawahi :
 - 1) Kepala Seksi Tumbuh Kembang Anak
 - 2) Kepala Seksi Perlindungan Anak
 - 3) Kepala Seksi Pemantapan Lembaga Layanan Anak
- d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga, membawahi :
 - 1) Kepala Seksi Perlindungan Perempuan
 - 2) Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga
 - 3) Kepala Seksi Standarisasi Lembaga Layanan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
- e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, membawahi :
 - 1) Kepala Seksi Pengendalian Penduduk.
 - 2) Kepala Seksi Keluarga Sejahtera
 - 3) Kepala Seksi Keluarga Berencana
- f. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA)
 - 1) Seksi Tindak Lanjut
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha
 - 3) Seksi Pengaduan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut pada gambar :

GAMBAR 1.1

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



E. Kondisi Kepegawaian

Dalam rangka penyelegaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2020 didukung sumberdaya manusia yang diklasifikasikan kedalam komposisi pegawai menurut Jenis kepegawaian, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut golongan, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Jenis Pendidikan, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Pangkat dan Golongan, komposisi pegawai per desember 2020 disajikan terpilah laki-laki dan perempuan sebagai berikut :

Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kepegawaian

No	Jenis Kepegawaian	Jumlah		Total
		L	P	
1.	PNS Daerah	12	40	54
2.	Honorer	-	-	-
3.	PHL / Kontrak	13	10	23
Jumlah		25	50	75

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian. DP3APPKB Provinsi Kalteng Tahun 2020

Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah		Total
		L	P	
1.	Golongan IV	4	6	11
2.	Golongan III	4	31	36
3.	Golongan II	4	3	7
4.	Golongan I	-	-	-
Jumlah		12	40	52

*Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian. DP3APPKB
Provinsi Kalteng Tahun 2020*

Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Jenjang Pendidikan

No	Jenjang	Jumlah		Total
		L	P	
1.	SDN	0	0	0
2.	SLTP	0	0	0
3.	SLTA	4	7	14
4.	D3	0	4	5
5.	S1	4	19	25
6.	S2	3	5	8
7.	S3	-	1	1
Jumlah		13	39	52

*Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian. DP3APPKB
Provinsi Kalteng Tahun 2020*

Dengan melihat kondisi pada tabel tersebut di atas, berarti peningkatan jenjang pendidikan bagi PNS sudah dianggap sesuatu yang penting untuk jenjang karir. Kemudian untuk memenuhi kondisi yang sesuai dapat dilakukan pemetaan PNS dengan melakukan uji kompetensi untuk mengetahui keinginan dan kemampuan PNS berdasarkan kompetensi dan minatnya.

Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Jabatan	Esselon	Formasi	Jumlah		Total
				L	P	
1.	Kepala Dinas	Esselon II	1	1	0	1
2.	Sekretaris / Kabid	Esselon III	6	2	4	6
3.	Kasubbag / Kasubbid	Esselon IV	18	2	16	18
4.	Fungsional Tertentu /	Esselon V	3	1	2	3

	Arsiparis					
Jumlah			28	6	22	28

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian. DP3APPKB Provinsi Kalteng Tahun 2020

Dari data komposisi diatas bahwa ada kekosongan karena pension untuk jabatan

Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah		Total	Total per Golongan
			L	P		
1.	Pembina Utama	IV/e	0	0	0	10
2.	Pembina Utama Madya	IV/b	1	0	0	
3.	Pembina Utama Muda	IV / c	0	0	0	
4.	Pembina Tk. I	IV / b	1	5	6	
5.	Pembina	IV / a	2	1	3	
6.	Penata Tk. I	III / d	1	11	14	35
7.	Penata	III / c	1	8	4	
8.	Penata Muda Tk. I	III / b	2	8	12	
9.	Penata Muda	III / a	0	4	6	
10.	Pengatur Tk. I	II / d	0	2	2	7
11.	Pengatur	II / c	2	-	2	
12.	Pengatur Muda Tk. I	II / b	-	1	3	
13.	Pengatur muda	II / a	2	0	0	
14.	Juru Tk. I	I / d	0	0	0	0
15.	Juru	I / c	0	0	0	

16.	Juru muda TK. I	I/ b	0	0	0	
	Juru Muda	I/ a	0	0	0	
Jumlah			12	40	52	52

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian. DP3APPKB Provinsi Kalteng Tahun 2020

Komposisi jumlah PNS tahun 2020 sebanyak 52 orang, dari jumlah PNS tersebut sebagaimana tersebut pada tabel di atas, Golongan IV 10 orang ,Golongan III 35 orang dan golongan II 7 orang. Adapun golongan terbanyak Golongan III sebanyak 35 orang sebesar 67,21 %. Dimana di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dalam klasifikasi pegawai berdasarkan Komposisi Pegawai (PNS Daerah)

Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Usia

N o	Umur	Tahun 2020				Jumlah	%	Ket
		L	%	P	%			
1.	< 30 Tahun	0	0	0	0	0	0	Produktif
2.	30 – 39 Tahun	3	5,77	11	21,15	14	26,92	26,92 %
3.	40 – 49 Tahun	4	7,69	12	23,08	16	30,77	Umum 30,77 %
4.	≥ 50 tahu n	5	9,62	17	32,69	22	42,31	Kurang Produktif 42,31 %
Jumlah		12	23,08	40	76,92	52	100	

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian. DP3APPKB Provinsi Kalteng Tahun 2020

Dengan memperhatikan Tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa PNS yang usia produktif (< 40 tahun) tergolong minim atau sebesar 30,77 %, justru sebagian besar PNS berada pada kondisi usia kurang produktif (≥ 50 tahun) sebesar 42,31 % dan sampai dengan akhir tahun 2020, terdapat PNS yang akan memasuki Pensiun sebanyak 2 orang.

Kondisi ideal adalah seperti bentuk piramida, dimana Jumlah PNS termasuk dalam katagori produktif harus lebih banyak untuk menunjang produktivitas kerja, dengan komposisi sebagai berikut :

- PNS dalam usia produktif < 40 tahun sebesar 26,92 % atau sebanyak 14 orang.
- PNS yang berusia 40 – 49 tahun sebesar 330,77 % atau sebanyak 16 orang.
- PNS dalam katagori kurang produktif (> 50 tahun) sebesar 42,31 % atau sebanyak 22 orang.

F. Isu – isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan, maka isu strategis dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah lima tahun ke depan, meliputi :

Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

1. Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan :
 - a. meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan

b. meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak

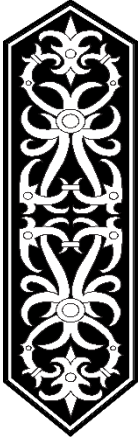
- kekerasan, termasuk TPPO
- c. meningkatkan efektivitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan

2. Perlindungan Anak :

- a. meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup
- b. penguatan sistem perlindungan anak mencakup pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya
- c. peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1. Meningkatkan koordinasi antar stakeholder pelaksana kebijakan KB KS di Provinsi Kalimantan tengah terutama sinkronisasi data pelaksanaan KB di Kabupaten/Kota
2. Meningkatkan sinergitas kebijakan pembangunan kependudukan dan KB melalui sosialisasi dan advokasi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat
3. Meningkatkan dukungan sarana, prasarana dan anggaran yang memadai untuk program KB melalui APBD
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat terutama PUS untuk menjadi akseptor Keluarga Berencana
5. Meningkatkan layanan terhadap permasalahan kesehatan reproduksi perempuan dan remaja
6. Meningkatkan fungsi keluarga sebagai institusi pelindung anak-anak untuk berkembang



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

1.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, maka tugas pokok Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah, menyelenggarakan fungsi :

- a) perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) fasilitasi, advokasi dan sosialisasi kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
- d) perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengarusutaman gender dan Pemberdayaan Perempuan.
- e) perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.

- f) perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi perlindungan dan tumbuh kembang anak;
- g) perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
- h) perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi penyusunan informasi data;
- i) pengelolaan kesekretariatan Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;
- j) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan tanggungjawab.

b. Urusan pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, maka tugas pokok Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah juga pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud untuk dalam Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah, menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) fasilitasi, advokasi dan sosialisasi kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- 4) perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengendalian penduduk;
- 5) perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;

- 6) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan tanggungjawab.

Tingkat Pencapaian

Tingkat pencapaian Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Perangkat Daerah merupakan perbandingan capaian kinerja pelayanan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan indikator kinerja yang sudah tertuang dalam Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dimana didalamnya diterangkan jenis indikator yang dikaji serta ketentuan peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk menganalisa kinerja pelayanan Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Indikator Kinerja Kunci (IKK), dengan sasaran target sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah dan/atau berdasarkan analisis standar kebutuhan pelayanan.

1.2. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator tersebut adalah sebagai berikut.

Pada tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis, Kesebelas sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 14 (empat belas) indikator kinerja. Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi

Kalimantan Tengah realisasinya pada tahun 2020 mencapai **Persen** dengan pengukuran pada masing-masing **tujuan strategis** sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng	Persen	3,00	0,97	32,33
Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga	Persentase perempuan di lembaga legislatif	Persen	28,89	31,58	100
	Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam Keluarga	Persen	33,41	33,36	99,85
Rata – rata capaian Tujuan					77,39%

Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
Berkurangnya Kasus kekerasan Terhadap perempuan termasuk TPPO	Rasio kekerasan Terhadap Perempuan	Rasio	0,0182	8,5097	100
Meningkatnya Kualitas penanganan Kasus kekerasan Terhadap perempuan termasuk TPPO	Persentase Perempuan Korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar	Persen	25	100	100
Rata – rata capaian Tujuan					100 %

Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap Anak

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
Berkurangnya Kasus kekerasan terhadap anak	Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori Pratama	Persen	35,71	0	0
	Rasio anak Korban Kekerasan	Rasio	0,0182	1,0083	100
Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada Anak	Persentase anak Korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	Persen	100	100	100
Rata – rata capaian Tujuan					66,67%

Tujuan 4 : Meningkatkan kualitas data gender dan anak

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kualitas data pilah gender dan Anak	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak	Persen	13,33	11,11	83,34
Rata – rata capaian Tujuan					83,4

Tujuan 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan Anggaran	Hasil Penilaian SAKIP	Skor	B+	B+	100%
Rata – rata capaian Tujuan					100%

**Tujuan 6 : Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan
Pengendalian penduduk, keluarga Berencana dan Keluarga
sejahtera**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
Menurunnya angka kelahiran	Angka kelahiran total per WUS	Total Fertility Rate (TFR)	2,26	2,24	97,76
	Rata-rata jumlah anak per Keluarga	Anak	1	1	100
Meningkatnya akseptor KB	Rasio pemakaian kontrasepsi	Rasio	0,829	0,7985	90,58
Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan berkontrasepsi yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	17,02	11,31	50,66
Rata – rata capaian Tujuan					84,75%

Capaian Sasaran Dinas P3APKB Provinsi Kalteng Tahun 2020

No	Sasaran	Tingkat Capaian
1	Meningkatnya Implementasi Pengarustamaan Gender	32,33
2	Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan public dan pendapatan keluarga	100
3	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	99,85
4	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	100
5	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	100
6	Meningkatnya kualitas perlindungan khusus kepada anak	100
7	Meningkatnya kualitas data terpilah gender dan anak	83,34
8	Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran	100
9	Menurunnya angka kelahiran	97,76
10	Meningkatnya akseptor KB	100
11	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	90,58
	Rata-rata persentase Capaian Sasaran	91,26 %

Dalam hal anggaran, dukungan APBD pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2020 sebesar Rp. 10.788.314.369,- dengan alokasi sebagai berikut :

NO.	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI		
			KEUANGAN	%	FISIK(%)
1.	Belanja Tidak Langsung	7.909.105.580	6.781.556.560	85,74	100
2.	Belanja Langsung	2.879.208.789	2.742.539.644	95,25	96,04
Jumlah		10.788.314.369	9.524.096.204	88,28	98,94

Pencapaian kinerja input pada masing-masing Program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%
1	2	3	5	6
2.02-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.707.213.815	1.637.342.142	95,91
1	Penyediaan jasa surat menyurat	4.005.000	4.005.000	100,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	103.660.627	84.165.197	81,19
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	103.406.800	89.136.368	86,20
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	220.500.800	205.673.250	93,28
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	44.780.000	44.391.00	99,13
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12.000.000	11.997.00	99,97
10	Penyediaan alat tulis kantor	71.114.500	71.105.900	99,99
11	Penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan	35.000.000	35.000.000	100,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000	10.000.000	100,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%
1	2	3	5	6
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	24.500.000	21.612.000	88,21
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	21.762.000	21.674.000	99,60
17	Penyediaan makanan dan minuman	30.000.000	29.877.000	99,59
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	109.444.259	107.193.419	97,94
19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	212.866.629	212.866.000	100,00
70	Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak	704.173.200	688.646.000	97,79
2.02-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	40.000.000	40.000.000	100,00
10	Pengadaan Meubelair	0	0	0
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.000.000	10.000.000	100,00
31	Pemeliharaan rutin/berkala pagar, halaman dan tempat parkir	25.000.000	25.000.000	100,00
194	Penataan Taman dan Kebersihan Serta Kebun Hortikultura	5.000.000	5.000.000	100,00
2.02-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	75.841.000	71.006.195	93,63
1	Pendidikan dan pelatihan formal	2.600.000	2.600.000	100,00
36	Rapat koordinasi perencanaan	69.491.000	64.656.195	93,04
149	Peningkatan Kapasitas Sistem Perencanaan	3.750.000	3.750.000	100,00
2.02-6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	129.774.400	127.927.500	98,58
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6.904.000	6.875.600	99,59

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%
1	2	3	5	6
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	39.000.000	39.000.000	100,00
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	8.500.000	8.475.500	99,71
6	Penyusunan RKA-SKPD	18.150.000	16.460.000	90,69
11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	0	0	0
15	Penyusunan renja SKPD	16.466.500	16.466.500	100,00
55	Penyusunan Renstra SKPD	10.400.000	10.296.000	99,00
63	Rapat Koordinasi Perencanaan dan Rapat Evaluasi dengan Kab/Kota se-Kalimantan Tengah	30.353.900	30.353.900	100,00
2.02-8	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	17.600.000	16.352.000	92,91
1	Pengelolaan Inventaris Barang Daerah	17.600.000	16.352.000	92,91
2.02-15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	406.888.164	355.949.340	87,48
5	Rakorda pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak	34.800.000	31.900.000	91,67
10	Rakor Pokja PUG dan Tim Teknis ARG Tingkat Provinsi	0	0	0
20	Rapat Koordinasi Gugus Tugas PHA Tingkat Provinsi	0	0	0
24	Rapat Koordinasi Forum Anak Provinsi	75.000.000	66.349.600	88,47
25	Rakornas Forum Anak Nasional	0	0	0
29	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu	0	0	0
30	Rapat Koordinasi Pokjatap Gerakan Sayang Ibu (GSI) Provinsi,Kabupaten dan Kota	50.923.764	50.923.764	100,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%
1	2	3	5	6
31	Rapat Koordinasi Forum data Terpilah Gender dan Anak Tingkat Kab./Kota	0	0	0
40	Monev PUG di Daerah	1.429.000	1.429.000	100,00
44	Rapat Forum Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	0	0	0
45	Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD) PPA Provinsi Kalimantan Tengah	170.000.000	130.611.576	76,83
46	Rapat Koordinasi Tim Lembaga Perlindungan Perempuan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah	74.735.400	74.735.400	100,00
2.02-16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	52.793.700	47.534.500	90,04
33	Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG)	52.793.700	47.534.500	90,04
42	Pemantapan Jejaring Kelembagaan	0	0	0
2.02-17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	84.424.710	84.318.180	99,87
26	Peningkatan Peran dan kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Kalteng	78.187.210	78.080.680	99,86
42	Promosi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	6.237.500	6.237.500	100,00
43	Pembinaan Terhadap Posyandu Melalui Penguatan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	0	0	0
2.02-18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	162.241.400	160.737.600	99,07
7	Pameran dan pawai pembangunan dalam rangka pembangunan pemberdayaan perempuan	72.717.600	72.717.600	100,00
25	Promosi Peningkatan Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan	75.000.000	73.500.000	98,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%
1	2	3	5	6
26	Capacity Building Bagi Perempuan	0	0	0
27	Peningkatan Kelompok Usaha Perempuan	14.523.800	14.520.000	99,97
2.02-20	Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	48.910.100	48.910.100	100,00
23	Monitoring Evaluasi Pencapaian dan Pelaksanaan KLA	30.510.100	30.510.100	100,00
24	Pembinaan dan Bimbingan Pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak	18.400.000	18.400.000	100,00
26	Sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	0	0	0
2.02-21	Program Penyusunan Profil Lembaga	55.650.000	55.650.000	100,00
9	Pengembangan Sistem Informasi Data Terpilah Gender dan Anak	37.200.000	37.200.000	100,00
10	Penyusunan Buku Data Terpilah Gender dan Anak	0	0	0
12	Publikasi dan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	0	0	0
22	Pengembangan Layanan Keterbukaan Informasi Publik	18.450.000	18.450.000	100,00
2.08-15	Program Keluarga Berencana	97.871.500	96.812.095	98,92
2	Pelayanan KIE	0	0	0
25	Promosi Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan dan Pengaturan Kelahiran Pada Masyarakat Kab./Kota se Kalimantan Tengah	63.449.500	63.449.500	100,00
29	Konsultasi/Koordinasi ke Pusat dan Daerah Tentang Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk	19.599.100	18.589.695	94,85
34	Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk	14.822.900	14.772.900	99,66

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%
1	2	3	5	6
35	Monev Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	0	0	0
50	Pembinaan Ketahanan Keluarga pada Kegiatan Momentum Keluarga Berencana	0	0	0
53	Peningkatan Kapasitas Bina Ketahanan Remaja dalam Kesehatan Reproduksi Remaja	0	0	0
	JUMLAH	2.879.208.789	2.742.539.644	95,25

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja dan anggaran harus lebih cermat agar tidak menghambat pencapaian kinerja *output* dan *outcome* dengan mempertimbangkan Program/Kegiatan prioritas.
2. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif guna mendukung proses pelaksanaan pencapaian kinerja di bidang layanan masing-masing.
3. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana operasional perkantoran harus diprioritaskan. Untuk itu perlu adanya perencanaan terhadap pemenuhan kebutuhan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang.

Visi dan Misi

Secara ringkas Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

Visi

Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

“Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta keluarga sejahtera dan berkualitas

Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut ditetapkan 4 (empat) Misi yang akan dilakukan secara konsisten, yaitu :

- 1) Meningkatkan Kesetaraan gender diberbagai bidang pembangunan.
- 2) Meningkatkan Perlindungan terhadap perempuan dan anak
- 3) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 4) Meningkatkan kualitas pelaksanaan program keluarga berencana

Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada 5 (lima) tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi. Peformulaan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan. Dengan berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan strategis yang dituangkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 - 2021 diformulakan sebagai berikut :

- | | |
|-----------------|---|
| <i>Tujuan 1</i> | Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam pembangunan |
| <i>Tujuan 2</i> | Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan |
| <i>Tujuan 3</i> | Meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap Anak |
| <i>Tujuan 4</i> | Meningkatkan kualitas data gender dan anak |
| <i>Tujuan5</i> | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| <i>Tujuan 6</i> | Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera |

Sasaran

Berdasarkan peformulaan tujuan, maka diformulakan sasaran strategis searah dengan tujuan strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, yang akan dicapai tahunan selama periode Renstra. Peformulaan sasaran strategis dapat dirinci sebagai berikut :

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Kesetaraan gender dalam Pembangunan	Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng
		Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan Pendapatan Keluarga	Persentase perempuan di lembaga legislatif
			Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga
2.	Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan	Berkurangnya kasus kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan
		Meningkatnya Kualitas Penanganan kasus kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan Standar
3.	Meningkatkan	Berkurangnya	Persentase

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	kualitas perlindungan khusus terhadap Anak	kasus kekerasan terhadap anak	Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori Pratama
			Rasio anak korban kekerasan
		Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada Anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar
4	Meningkatkan kualitas data gender dan anak	Meningkatnya kualitas data terpilah gender dan anak	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak
5.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran	Hasil Penilaian SAKIP (skor)

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
6.	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Pengendalian penduduk, keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera	Menurunnya angka kelahiran	Angka kelahiran total per WUS Rata-rata jumlah anak per Keluarga
		Meningkatnya akseptor KB	Rasio pemakaian Kontrasepsi
		Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan berkontrasepsi yang tidak terpenuhi (unmet need)

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah serta RPJMD 2016 - 2021.

Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator- indikator kinerja yang ada dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 - 2021 yang memiliki fokus pada perspektif *stakeholder*, sedangkan yang fokusnya pada internal *business process* (peningkatan kapasitas jaringan internal organisasi) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Indikator kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2016 - 2021 sesuai periode Renstra adalah sebagai berikut :

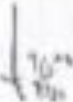
Indikator Kinerja Utama (IKU)

SEKTOR	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng
	Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga	Persentase perempuan di lembaga legislatif
		Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga
	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan
	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar
	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori Pratama
		Rasio anak korban kekerasan

SEKTOR	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
	Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar
	Meningkatnya kualitas data terpilah gender dan anak	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak
	Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan Anggaran	Hasil Penilaian SAKIP (skor)
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Menurunnya angka kelahiran	Angka kelahiran total per WUS
		Rata-rata jumlah anak per Keluarga
	Meningkatnya akseptor KB	Rasio pemakaian kontrasepsi
	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan berkontrasepsi yang tidak terpenuhi (unmet need)

Tabel 2. 3

Perjanjian Kinerja Utama Dinas P3APKB Provinsi Kalimantan Tengah

	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Jalan M. H. Thamrin No. 11 Palangka Raya 73112 Telp. 0536 - 3224547
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :	
Nama	: dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes
NIP	: 19630527 199102 1 001
Jabatan	: KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
selanjutnya disebut pihak pertama	
Nama	: H. SUGIANTO SABRAN
Jabatan	: GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua	
Guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik maka perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2021 sebagaimana terlampir.	
Demikian Penetapan Indikator Kinerja Utama ini dibuat sebagaimana dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan kinerja.	
Pihak Kedua, GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,	Palangka Raya, Januari 2020
H. SUGIANTO SABRAN	Pihak Pertama, KEPALA DINAS,
	dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes NIP. 19630527 199102 1 001 



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan M. H. Thamrin No. 11 Palangka Raya 73112

Telp. 0536 - 3224547

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Unit	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Tugas dan Fungsi	Membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas P3APKB Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi : - Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; - Pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; - Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; - Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan; - Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan; - Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi perlindungan dan pemenuhan hak anak; - Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengendalian penduduk; - Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi keluarga sejahtera dan peningkatan kualitas hidup keluarga; - Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, pelatihan, penelitian dan pengembangan; - Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi penyusunan informasi data; - Penyelenggaraan urusan kesekretariat Dinas; dan - Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan tanggung jawab.

No.	Besaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara perhitungan	Sumber data
1.	Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender	Persentase ARD pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng	Jumlah ARD pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng dibagi Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng dikali 100	DINAS PSAPPKB, RAPFEDARBANG, BRAD
2.	Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga	Persentase perempuan di lembaga legislatif	Jumlah Perempuan di lembaga legislatif (DPRD) dibagi Jumlah Anggota Legislatif (DPRD) dikali 100	DINAS PSAPPKB, BPS, Sekretariat DPRD
		Persentase Sumbangan Pendapatan perempuan dalam keluarga	Jumlah Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam Keluarga dibagi Total Pendapatan dikali 100	DINAS PSAPPKB, BPS
3.	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dibagi Jumlah Penduduk Perempuan dikali 1000	DINAS PSAPPKB (UPT-PPA)
4.	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Yang diterapi sesuai Standar dibagi Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dikali 100	DINAS PSAPPKB (UPT-PPA)
5.	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori prima	Jumlah Kab./Kota Layak Anak dibagi Jumlah Kab./Kota dikali 100	DINAS PSAPPKB
		Rasio anak korban kekerasan	Jumlah Anak Korban Kekerasan dibagi Jumlah Anak dikali 1000	DINAS PSAPPKB (UPT-PPA)
6.	Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang diterapi sesuai standar dibagi Jumlah Anak Korban	DINAS PSAPPKB (UPT-PPA)

No.	Basaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara perhitungan	Sumber data
			Kelahiran) dikali 100	
7.	Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak	Jumlah PD yang memiliki sistem data gender dan anak dibagi Jumlah PD) dikali 100	DINAS (SAANPRB)
8.	Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan penempatan program dan anggaran	Hasil Penilaian SAKIP		Inspektorat, Biro Organisasi
9.	Menurunnya angka kelahiran	Angka kelahiran total per WUS	Jumlah kelahiran hidup laki-laki dan perempuan tiap 1000 penduduk yang hidup hingga akhir masa reproduksi	BPS, BKKBN
		Rata-rata jumlah anak per keluarga	Jumlah anak dibagi dengan jumlah keluarga	BPS, BKKBN
10.	Meningkatnya akseptor KB	Rasio pemakaian kontrasepsi	Jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur (PUS) pada tahun yang sama	BPS, BKKBN
11.	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan berkontrasepsi yang tidak terpenuhi (unmet need)	(Jumlah pasangan usia subur (PUS) yang ingin memiliki keturunan atau tidak menginginkan tambahan anak tetapi tidak ber-KB (Unmet need KB) dibagi Total Jumlah PUS) dikali 100	BPS, BKKBN

Pihak Kedua,
 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

 H. SUGIANTO SABRAN

Pelangia Raya, Januari 2020
 Pihak Pertama,
 KEPALA DINAS,

 dr. ADM. TANJUDUNG, M.Kes
 NIP. 19630527196102 1 001

Penetapan Kinerja Tahun 2020

Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 tahun 2004 dan surat Edaran Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : SE/321/M.PAN/12/2004 tentang penetapan kinerja.

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber dana yang dikelolanya.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk :

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan
5. Sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan atau sanksi

Penetapan kinerja SKPD yang telah sepakati pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng	2,57
2.	Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga	Persentase perempuan di lembaga legislatif	38,89
		Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	33,36
3.	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan	0,0123
4.	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar	25
5.	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori pratama	35,71
		Rasio anak korban kekerasan	0,0213
6.	Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	25
7.	Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak	11,11

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran	Hasil Penilaian SAKIP	B+
9.	Menurunnya angka kelahiran	Angka kelahiran total per WUS	2,28
		Rata-rata jumlah anak per Keluarga	1
10.	Meningkatnya akseptor KB	Rasio pemakaian kontrasepsi	0,815
11.	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan berkontrasepsi yang tidak terpenuhi (unmet need)	18,51

Tabel 2.5

Perjanjian Kinerja Dinas P3APKB Provinsi Kalimantan Tengah



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 Jalan M. H. Thamrin No. 11 Palangka Raya 73112
 Telp. 0536 - 3224547

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes**
 Jabatan : **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN**
 Jabatan : **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2020

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

H. SUGIANTO SABRAN

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS,

dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes
 NIP. 19630527 199102 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan M. H. Thamrin No. 11 Palangka Raya 73112
Telp. 0536 - 3224547

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng	persen	3,00
2	Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga	Persentase perempuan di lembaga legislatif	persen	26,89
		Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	persen	33,41
3	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan	Rasio	0,0182
4	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar	persen	100
5	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori prima	persen	35,71
		Rasio anak korban kekerasan	Rasio	0,0182
6	Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	persen	100
7	Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak	persen	13,33
8	Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran	Hasil Penilaian SAKOP	Skor	8+ / 88
9	Menurunnya angka kelahiran	Angka kelahiran total per WUS	Total Fertility Rate (TFR)	2,26
		Rata-rata jumlah anak per Keluarga	anak	1
10	Meningkatnya akseptor KB	Rasio pemakaian kontrasepsi	Rasio	0,829
11	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan berkontrasepsi yang tidak terpenuhi (unmet need)	persen	17,02

	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	2.241.525.799	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	90.500.000	
3.	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Asset/Barang Daerah	Rp.	22.650.000	
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	433.874.600	
5.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	290.630.480	
6.	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Rp.	1.837.555.171	
7.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rp.	131.801.375	
8.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rp.	303.514.700	
9.	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Rp.	401.738.125	
10.	Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Rp.	240.936.000	
11.	Program Penyusunan Profil Lembaga	Rp.	333.872.200	
12.	Program Keluarga Berencana	Rp.	394.216.675	

Palangkaraya, Januari 2020

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS,

H. SUGIANTO SABRAN

dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes
NIP. 19630827 199102 1 001



1.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Terlampir)



1.3. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Subbab ini disusun oleh semua perangkat daerah, untuk kemuddian akan diverifikasi oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah.

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat:

- a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja
- b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja
- c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya
- d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah
- e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikalikan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai
- f. Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

(LAKIP Terlampir)



1.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

N o	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (OUTPUT)	Capaian Kinerja (rumus)	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	a. Outcome : Perse ntase ARG pada belanj a langsu ng APBD	$\frac{54.523.881.958}{2.210.779.958.177,32} \times 100$ $\% = 2,47 \%$ $\frac{\text{Total Jumlah ARG SOPD}}{\text{Total Julah Pagu APBD}} \times 100$ $\%$	DP3APPKB Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	
		1) Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi yang telah dilatih PUG	Jumlah SOPD Tahun 2020 = 15	Dinas P3APPKB	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2) Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat provinsi	Jumlah Program / Kegiatan Tahun 2020 = 23 Program 55 Kegiatan	Dinas P3APPKB	sda
		b. Outcome : Rasio kekerasan terhadap ap anak per 10.00 0 anak			
		1) Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemprov (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Jumlah = 2 Media Elektronik 1. Websitpe https://dp3appkb.kalteng.go.id 2. ppid.kalteng.go.id	Dinas P3APPKB	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait



N o	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (OUTPUT)	Capaian Kinerja (rumus)	Sumber Data	Keterang an
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2) Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Jumlah = 4 1. LPA = Lembaga Perlindungan Anak 2. LPKA= Lembaga Pembinaan Khusus Anak 3. UPT-PPA= Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak 4. PATBM=Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	sda
		3) Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	$\frac{55,991}{73} \times 100\% = 76,7\%$ <i>A = jumlah korban kekerasan anak yang dilayani = 55,991</i> <i>B = jumlah korban kekerasan anak di tingkat provinsi = 73</i>	Data Simponi	sda
		4) Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	Jumlah = 0		sda
		5) Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/ fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)	Jumlah = 0		sda
		c. Outcome : Rasio kekerasan terhadap perempuan,			



N o	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (OUTPUT)	Capaian Kinerja (rumus)	Sumber Data	Keterang an
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan			
		1) Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Jumlah = 7	Dinas P3APPKB Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2) Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	Jumlah = 13	Dinas P3APPKB Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga	sda
		3) Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	$\frac{33,75}{45} \times 100\% = 75\%$ <i>A = jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan = 33,75</i> <i>B = jumlah korban kekerasan terhadap perempuan = 45</i>	Data Simponi	sda
		4) Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapat pelatihan	Jumlah = 0	Dinas P3APPKB	sda
		5) Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapatkan bantuan	Jumlah = 0	Dinas P3APPKB	sda



N o	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (OUTPUT)	Capaian Kinerja (rumus)	Sumber Data	Keterang an
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)			
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	a. Outcome : TFR (Angka Kelahiran Total)			
		1) Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Tidak ada		Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2) Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	MUKP = 20,3	SKAP (Survey Kinerja Akuntabilitas Program)	Median Usia Kawin Pertama Wanita Usia 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Trend usia kawin pertama penting untuk menentukan pola fertilitas di Indonesia. Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		3) Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	ASFR = 58,4 $ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} \times k$	SKAP (Survey Kinerja Akuntabilitas Program)	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait



N o	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (OUTPUT)	Capaian Kinerja (rumus)	Sumber Data	Keterang an
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			ASFR adalah angka kelahiran di kelompok usia 15-19 tahun		
		4) Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	$\frac{205}{509,443} \times 100\% = 0,0004\%$ <i>A = jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE) = 205</i> <i>B = jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE) = 509,443</i>	Bidang PPKB	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		5) Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	Jumlah = 1 BKKBN	Bidang PPKB	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK
		b. Outcome : Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)			



N o	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (OUTPUT)	Capaian Kinerja (rumus)	Sumber Data	Keterang an
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1) Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	$\frac{1471}{1869} \times 100\% = 78,70\%$ <i>A = jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP = 1471</i> <i>B = jumlah faskes = 1869</i>	Bidang PPKB	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2) Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	$\frac{385,858}{487,739} \times 100\% = 79,11\%$ <i>A = jumlah Peserta KB Aktif = 385,858</i> <i>B = jumlah PUS = 487,739</i>	Bidang PPKB	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		3) Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Jumlah = 131.004 Kelompok KKBPK Tahun 2020 KEL BKB = 54.649 KEL BKR = 46.564 KEL BKL = 29.791	Bidang PPKB	Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		4) Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	$\frac{1708}{14.670} \times 100\% = 11,64\%$ <i>A = jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern = 1.708</i> <i>B = jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan = 14.670</i>	Bidang PPKB	KB Pasca Persalinan adalah pelayanan KB yang diberikan setelah persalinan sampai dengan kurun waktu 42 hari Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		c. Outcome : Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet)			



N o	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (OUTPUT)	Capaian Kinerja (rumus)	Sumber Data	Keterang an
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		t need)			
		1) Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	$\frac{0}{14} \times 100\% = 0\%$ $A = \text{jumlah Kabupaten/Kota}$ dengan persentase kesertaan KB 50% dari total seluruh Kabupaten/Kota dengan persentase kesertaan KB paling rendah = 0 $B = \text{jumlah seluruh}$ Kabupaten/kota = 14	Bidang PPKB	Daftar Kabupaten/Kota yang memiliki persentase kesertaan KB paling rendah dalam satu Provinsi. Data/informasi yang diambil adalah 50% dari total seluruh Kabupaten/Kota dengan persentase kesertaan KB paling rendah Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2) Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	$\frac{9.579}{509,443} \times 100\% = 1,88\%$ $A = \text{jumlah peserta KB pada}$ <i>Keluarga Penerima PBI</i> = 9.579 $B = \text{jumlah Keluarga PBI} =$ 509,443	Bidang PPKB	Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang iuran jaminan kesehatannya dibayarkan oleh Pemerintah. Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait



1.3.1.Indikator Kinerja Kunci Hasil

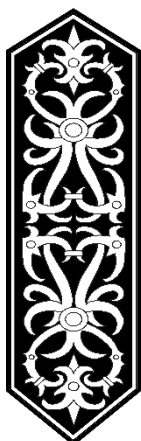
No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1) Persentase ARG pada belanja langsung APBD	$\frac{54.523.881.958}{2.210.779.958.177,32} \times 100\% = 2,47\%$ <i>A = Jumlah ARG pada belanja langsung APBD</i> = 54.523.881.958 <i>B = Jumlah seluruh anggaran belanja langsung di provinsi</i> = 2.210.779.958.177,32	Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Penjelasan lengkap terdapat pada Pedoman Penyusunan LPPD Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2) Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	$\frac{81}{81} \times 10.000 = 10.000$ <i>A = Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat provinsi yang didampingi</i> = 81 <i>B = Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun)</i> = 81	Data Simponi	sda
		3) Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	$\frac{108}{1.295} \times 100.000 = 8.339$ <i>A = Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan</i> = 108 <i>B = Jumlah penduduk perempuan di Provinsi</i> = 1.295 ribu jiwa (2019)	Data Simponi	sda
14.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1) TFR (Angka Kelahiran Total)	$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} \times k$ TFR = Angka Kelahiran Total = 2,4	SKAP (Survey Kinerja Akuntabilitas Program)	Penjelasan lengkap terdapat pada Pedoman Penyusunan LPPD Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur = 53,0 bi = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19 pada tahun tertentu = 53,0 Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 20-24 pada tahun tertentu = 131,5 Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 25-29 pada tahun tertentu = 109,9 Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 30-34 pada tahun tertentu = 76,6 Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 35-39 pada tahun tertentu = 61,9 Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 40-44 pada tahun tertentu = 11,0 Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 45-49 pada tahun tertentu = 5 pi = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama = i = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, i=2 untuk kelompok umur 20-24,, i=7 untuk kelompok Umur 45-49) = K = Bilangan Konstanta biasanya 1000 =		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2) Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	$\frac{63.823}{487.739} \times 100\% = 13,08\%$ <i>A = jumlah peserta KB aktif modern = 63.823</i> <i>B = jumlah Pasangan Usia Subur = 487.739</i>	Bidang PPKB	sda
		3) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	$\frac{57.992}{487.739} \times 100\% = 11,88\%$ <i>A = jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani = 57.992</i> <i>B = jumlah Pasangan Usia Subur = 487.739</i>	Bidang PPKB	sda



BAB III

CAPAIAN KINERJA

PELAKSANAAN TUGAS

PEMBANTUAN

1.4. TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH PROVINSI

1. Dasar Hukum

Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyelenggarakan Program dan kegiatan didukung anggaran dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI berupa Dana Dekonsentrasi.

Adapun dasar hukum pemberian dukungan anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan



- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 10) Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas pembantuan;
- 11) Peraturan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 12) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Penatausahaan Dekonsentrasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah memperoleh dana APBN dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa Dana Dekonsentrasi APBN Tahun Anggaran 2020.

3. Program dan Kegiatan

Program/Kegiatan yang diterima dan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019 melalui Dana Dekonsentrasi APBN yaitu Program Partisipasi lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak peningkatan pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan di daerah dengan Kegiatan sebagai berikut :

- Bimbingan Teknis konseling keluarga, kesetaraan gender dan hak anak
- Layanan umum pelaksanaan teknis dekonsentrasi
- Fasilitasi perlindungan perempuan dan anak melalui Gerakan Bersama Jaga Keluarga Kita (BERJARAK)



Tabel : Matrik Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Provinsi

No	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPU T DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(6)
1.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia	Peraturan Menteri PPPA No 17 Tahun 2019 tentang pedoman umum pelaksanaan dekonsentrasi TA. 2020	Program: Partisipasi lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak peningkatan pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan di daerah Kegiatan: - Bimbingan Teknis konseling keluarga, kesetaraan gender dan hak anak - Layanan umum pelaksanaan teknis dekonsentrasi - Fasilitasi perlindungan perempuan dan anak melalui Gerakan Bersama Jaga Keluarga Kita (BERJARAK)	Provinsi Kalteng	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp. 650.000.000	Rp. 622.731.800	95,80	- Terpenuhinya kebutuhan spesifik perempuan dan anak - Meningkatnya konselor keluarga yang terlatih dan handal	100 %	

KETERANGAN:

Kolom (1) diisi nomor urut

Kolom (2) diisi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang memberikan penugasan (tugas pembantuan)

Kolom (3) diisi peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian tentang penugasan urusan pemerintahan sebagai dasar pelaksanaan tugas pembantuan

Kolom (4) diisi nama program, kegiatan, output, dan rincian kegiatan tugas pembantuan sesuai DIPA dan Juklak/Juknis

Kolom (5) diisi tempat atau lokasi pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan

Kolom (6) diisi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan keputusan gubernur tentang penetapan perangkat daerah pelaksana tugas pembantuan

Kolom (7) diisi alokasi anggaran tugas pembantuan sesuai DIPA

Kolom (8) diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam rupiah

Kolom (9) diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam persentase

Kolom (10) diisi realisasi capaian kegiatan tugas pembantuan dalam bentuk narasi berdasarkan output yang telah ditetapkan

Kolom (11) diisi realisasi capaian kegiatan dalam bentuk persentase berdasarkan output yang telah ditetapkan



P E N U T U P

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah selama 1 tahun anggaran yang akan dikumpulkan secara kolektif oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya akan disampaikan oleh sekretariat daerah kepada kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Perangkat Daerah DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 merupakan laporan pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2020 dengan mengacu pada kewenangan Perangkat Daerah DP3A-PPKB, pelaksanaan asas desentralisasi, pengelolaan keuangan, tugas pembantuan serta tugas umum pemerintahan.

Dari hasil kinerja yang dilaporkan pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Perangkat Daerah DP3A-PPKB Tahun Anggaran 2020, dapat disimpulkan bahwa dalam pembangunan yang telah dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan, pada umumnya dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Hasil pembangunan yang telah dicapai pada tahun 2020, tentunya masih perlu untuk ditingkatkan kembali agar apa yang menjadi target dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Semarang tahun 2016 - 2021 dapat dicapai dan dilaksanakan.

Terhadap berbagai kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2020 akan dilakukan evaluasi untuk dapat dijadikan acuan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang. Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Perangkat Daerah DP3A-PPKB Tahun Anggaran 2020 ini dapat menjadi bahan bagi Pemerintah Provinsi untuk memberikan catatan-catatan sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan pembangunan kedepan di Provinsi Kalimantan Tengah guna mewujudkan Provinsi Kalimantan Tengah yang Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis).

Kepala Dinas P3A-PPKB
Provinsi Kalimantan Tengah,

dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19630527 199102 1 001



LAMPIRAN IKK DINAS P3APPKB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- I. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi yang telah dilatih PUG
II. Jumlah Program/Kegiatan PUG pada perangkat Daerah yang sudah di evaluasi melalui analisis gender di tingkat provinsi

Program Kegiatan ARG Tahun 2020

NO	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
1	Dinas Sosial	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Penyuluhan Sosial	Rp. 894.230.000
2	Badan Pengembangan SDM	Progam Pendidikan kedinasan	Pendidikan Penjenjangan struktural	Rp.1.694.200.000
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Pendayagunaan dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan	Pelatihan Kejuruan Prosesing Pertanian	Rp. 60.000.000
4	Dinas Koperasi dan UKM	-	Bintek Kewirausahaan bagi wira usaha baru	Rp.487.043.800
		-	Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM di Daerah	Rp. 20.000.000
5	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pembinaan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan kab/kota	Sosialisasi Peraturan menteri dalam negeri tentang pedoman	Rp. 385.000.000



NO .	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
			penyusunan APBD se-kalimantan	
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	Kegiatan tidak dilaksanakan karena anggaran yang tersedia tidak mencukupi-
7	Dinas Kelautan dan Perikanan	Peningkatan daya saing usaha produk kelautan dan perikanan	Pengembangan usaha pengolahan perikanan skala kecil	Rp. 600.000.000
8	Dinas Perkimtan	Program pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp.7.000.000
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp.500.000.000
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Rp.250.000.000
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp.3.500.000.000
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp.150.000.000



NO .	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
			Penyediaan alat tulis kantor	Rp.100.000.000
			Penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan	Rp.92.450.000
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp.50.000.000
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp.170.000.000
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp.50.000.000
			Penyediaan makanan dan minuman	Rp.75.000.000
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp.300.000.000
			Rapat-rapat koordinasi dan	Rp.187.500.000



NO .	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
			konsultasi ke dalam daerah	
			Penyediaan jasa informasi public dan website perangkat daerah	Rp.150.000.000
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	RP.147.500.000
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp.100.000.000
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp.80.000.000
		Program Peningkatan disiplin Aparatur	Pembinaan Kesehatan Jasmani/Aparatur	Rp.50.000.000
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp.100.000.000
			Penyusunan Pelaporan	Rp.25.000.000



NO .	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
			Keuangan dan Aset	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SOPD	Rp.138.954.500
			Ekspose hasil-hasil Pembangunan Bidang	Rp.500.000.000
		Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan asset/Barang Daerah	Pengelolaan Inventaris Barang Daerah	Rp.100.000.000
		Program Pengembangan Perumahan	Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan	Rp.50.000.000
			Perencanaan Kegiatan Perumahan dan Permukiman	Rp.500.000.000
			Koordinasi Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.246.651.250



NO .	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
			Pendataan Rumah tidak Layak Huni	Rp.650.000.000
			Koordinasi,Kons ultasi dan Sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah lain Terkait Urusan Perumahan	Rp.100.000.000
			Penyulahan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan	Rp.205.000.000
		Program Penataan,Penguasaan,Pe milikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Inventarisasi dan Verifikasi Ketersediaan Lahan Untuk PSU	Rp.100.000.000
		Program Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Pertanahan	Bimbingan Teknis,Koordinas i,Konsultasi, dan Sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat	Rp.100.000.000



NO .	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
			(Kementerian PUPR), Pemerintah kab/kota yang Menangani Bidang Pertanahan	
		Program Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	Inventarisasi data Permasalahan Pertanahan	Rp.50.000.000
		Program Penatausahaan Pertanahan	Rapat Kerja Teknis Pendaftaran Tanah	Rp.201.709.000
		Program Perencanaan Kawasan Permukiman	Appraisal Survey dan Pengukuran	Rp.250.000.000
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Insfratraktur Kawasan Permukiman	Rp.704.000.000
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kawasan Permukiman	Rp.185.350.000
		Program Peningkatan dan Pengembangan	Peningkatan Kualitas	Rp.38.512.193.708



NO .	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
		Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman	Infrastruktur Kawasan Permukiman	
9	Badan Kepegawaian Daerah	Pembinaan pengembangan sumberdaya aparatur	Seleksi penerimaan CAPRA IPDN	Rp.60.173.000
10	Dinas Kesehatan		Pertemuan Evaluasi Program Penanggulangan Masalah Kesehatan	Rp.123.740.000
			Supervisi Manajemen Pengendalian Hepatitis, Diare, Infeksi, Saluran Perencanaan dan Ispa, Imunisasi	Rp.71.560.000
			Bintek dalam Penanganan Gangguan Tumbuh Kembang	Rp. 77.840.000
			Pelayanan Operasi Katarak	Rp.509.650.000
			Pelayanan Kesehatan Lapangan	Rp.363.150.000



NO .	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
11	Bappedalitbang	Program Penanggulangan Kemiskinan	Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Rp. 351.000.000
			Koordinasi Percepatan Pencapaian Target RAD-PG, GERMAS dan Pencegahan Stunting	Rp.200.000.000
			Kegiatan Dewan Riset Daerah	Rp.400.000.000
			Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Rp. 351.000.000
12	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	Program Pengembangan Listrik dan Pemanfaatan Energi	Verifikasi desa Belum Berlistrik untuk Mendukung Rasio Elektrifikasi di Kalteng	Rp. 300.000.000
13	Biro Protokol dan Komunikasi Publik	-	-	Nihil



NO .	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
14	Biro Administrasi Pembangunan	-	-	Tidak Terdapat Program /Kegiatan yang Khusus Terkait Anggaran Responsif Gender (ARG)
15	Dinas P3APKB	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG)	Rp.52.793.700
		23 Program	55 Kegiatan	Rp.54.523.881.958



III. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan Pemprov (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak
a. Sumber data : Websitpe <https://dp3appkb.kalteng.go.id>

b. Sumber data PPID

The screenshot shows the website of the Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APKB) of Kalimantan Tengah. The page displays the title 'PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN KORBAN KDRT' and a list of documents. A table below the article lists 20 documents, including various reports, regulations, and internal communications, each with a date and a link to the document.

No	Judul Dokumen	Tipe Dokumen	Frekuensi	Tanggal	Aksi
10	Rencana Umum Pengadaan Tahun 2019	Pengadaan barang dan jasa	Berkala	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, PP dan KB 24 July 2019	Ubah Hapus Draft Copy Link
11	Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Per Tahun 2019	Profil Badan Publik	Berkala	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, PP dan KB 24 July 2019	Ubah Hapus Draft Copy Link
12	Informasi Administrasi Kepegawaian per Juli 2019	Profil Badan Publik	Setiap Saat	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, PP dan KB 24 July 2019	Ubah Hapus Draft Copy Link
13	SK Daftar Informasi Publik dan Lampiran Daftar Informasi Publik tahun 2020	Regulasi	Berkala	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, PP dan KB 24 February 2020	Ubah Hapus Draft Copy Link
14	Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, PP dan KB Provinsi Kalimantan Tengah	Laporan dan prosedur akses informasi	Setiap Saat	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, PP dan KB 24 February 2020	Ubah Hapus Draft Copy Link
15	Surat Menyurat Pimpinan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Informasi Kinerja	Setiap Saat	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, PP dan KB 23 June 2020	Ubah Hapus Draft Copy Link
16	Surat Keluar Dinas P3APKB	Informasi Kinerja	Setiap Saat	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, PP dan KB 23 June 2020	Ubah Hapus Draft Copy Link
17	Surat Masuk Dinas P3APKB	Informasi Kinerja	Setiap Saat	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, PP dan KB 23 June 2020	Ubah Hapus Draft Copy Link
18	Agenda Kerja Pimpinan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Informasi Kinerja	Setiap Saat	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, PP dan KB 23 June 2020	Ubah Hapus Draft Copy Link
19	Profil Singkat Pejabat tahun 2020	Profil Badan Publik	Berkala	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, PP dan KB 23 June 2020	Ubah Hapus Draft Copy Link
20	Tabel Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Jenisnya	Informasi Kinerja	Setiap Saat	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, PP dan KB 23 June 2018	Ubah Hapus Draft Copy Link



IV. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal

1. LPA (Lembaga Perlindungan Anak)
2. LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak)
3. UPT-PPA (Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak)

V. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani

No	Unit / Instansi	Kasus	Korban		Terlayani	
			N	Anak	% N	% Anak
1	Kabupaten Barito Selatan	7	6	5	100	100
2	Kabupaten Barito Timur	4	4	3	0	0
3	Kabupaten Barito Utara	13	13	8	53,9	75
4	Kabupaten Gunung Mas	2	2	0	50	0
5	Kabupaten Kapuas	13	14	8	35,7	25
6	Kabupaten Katingan	6	6	5	66,7	80
7	Kabupaten Kota Waringin Barat	0	0	0	0	0
8	Kabupaten Kota Waringin Timur	25	25	11	96	100
9	Kabupaten Lamandau	6	6	5	100	100
10	Kabupaten Murung Raya	2	2	2	0	0
11	Kabupaten Pulang Pisau	11	11	10	100	100
12	Kabupaten Seruyan	9	9	8	11,1	12,5
13	Kabupaten Sukamara	4	3	1	66,7	100
14	Kota Palangkaraya	31	32	15	100	100
	TOTAL	133	133	81	74,4	74,1



VI. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan

-

VII. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/ fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)

-

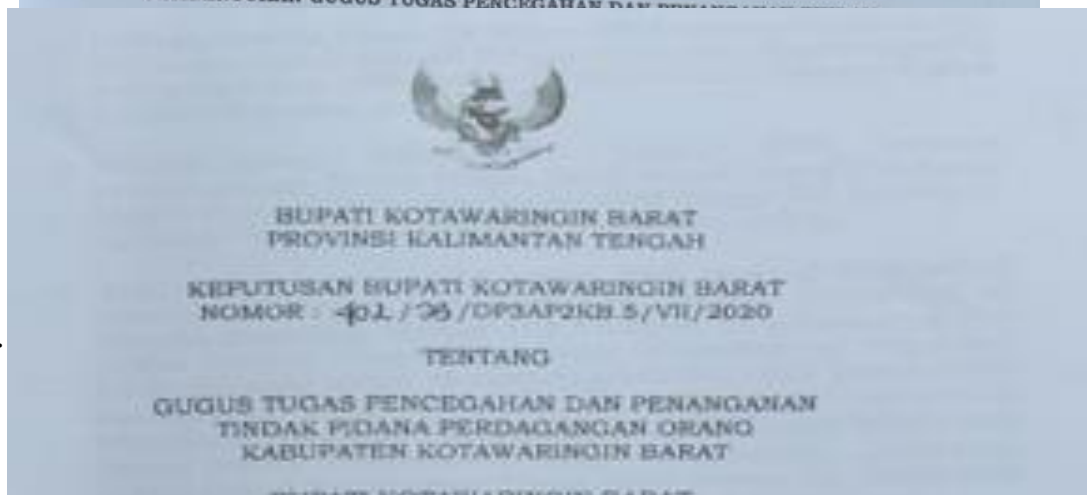
VIII. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi

1.



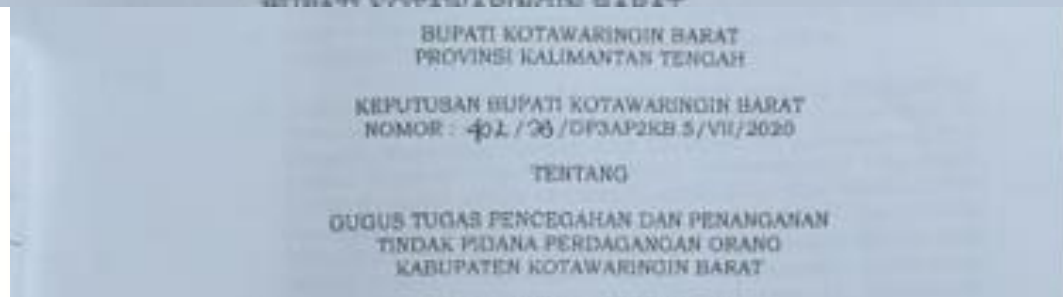
2.

3.



4.

5.





6.



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

7.



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 188.45/ 342 /IX/HUK/2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR : 188.45/428/XI/HUK/2018 TENTANG GUGUS TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
KABUPATEN LAMANDAU**

**IX. Jun
ters**

1. UPI-PPA



SALINAN

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 20 TAHUN 2019**

TENTANG

2.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

3.

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA**



**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR : 209 TAHUN 2017**

TENTANG



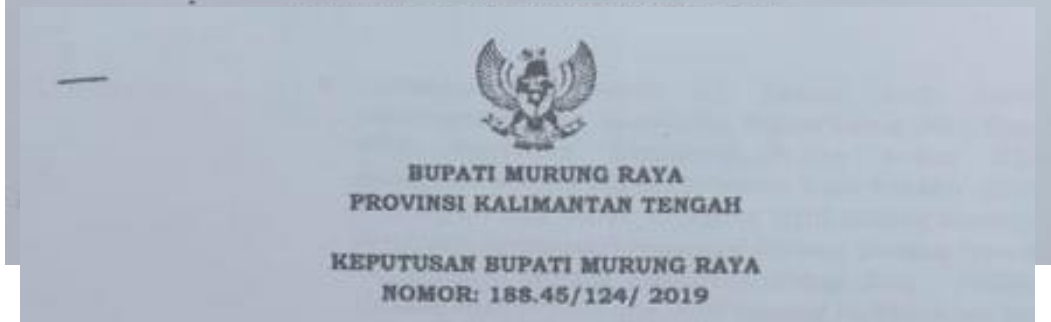
4.



5.



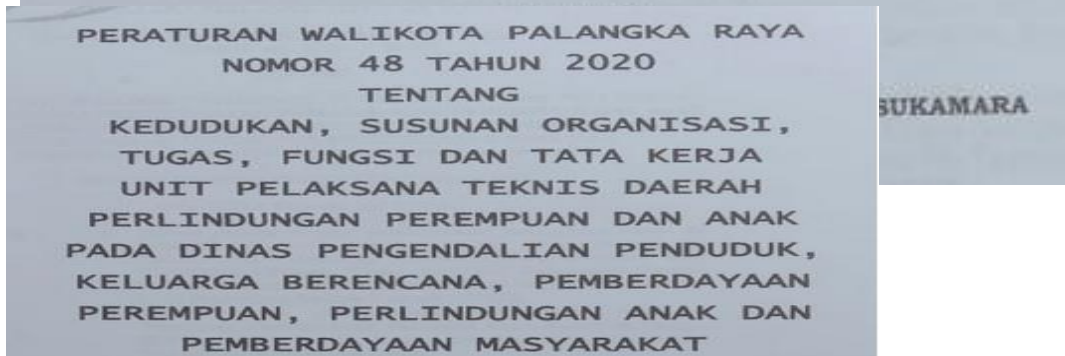
6.



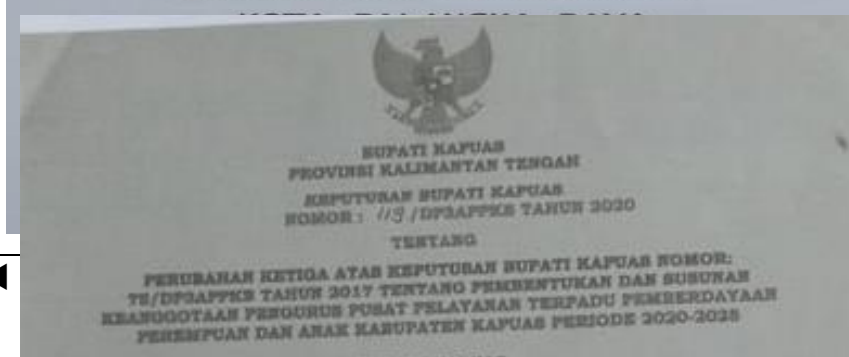
7.



8.

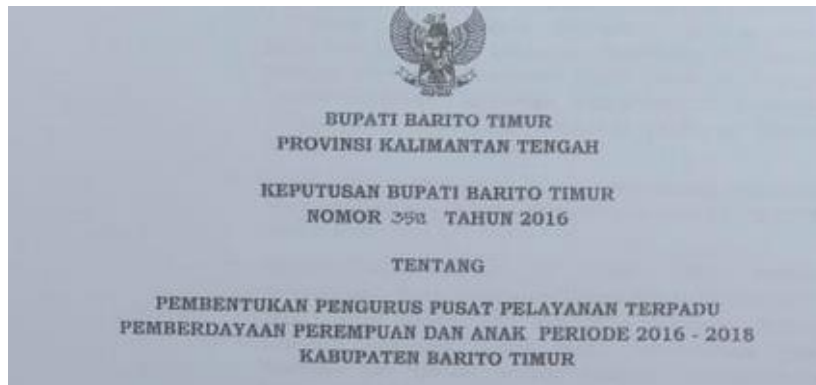


9.

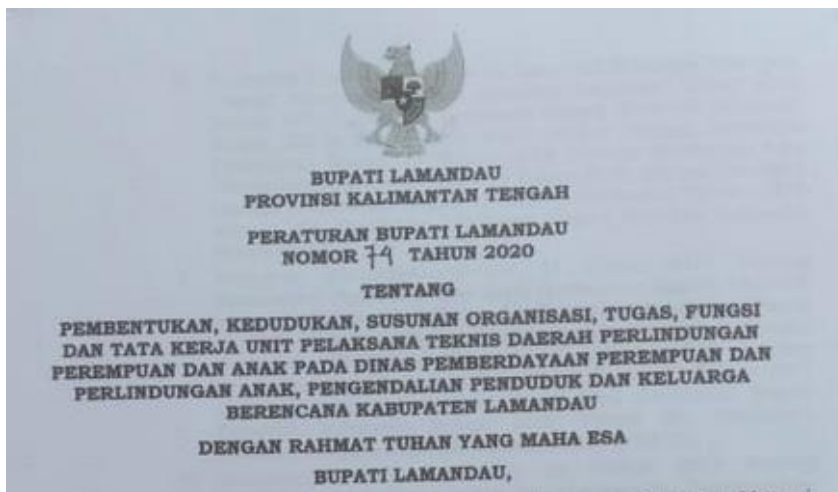




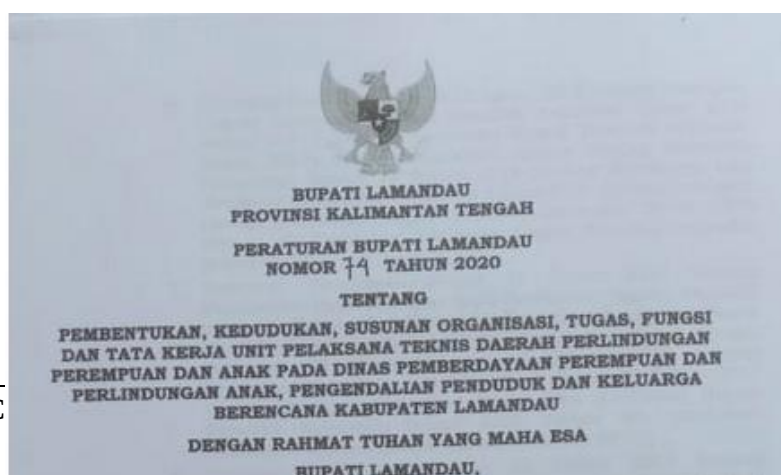
10.



11.

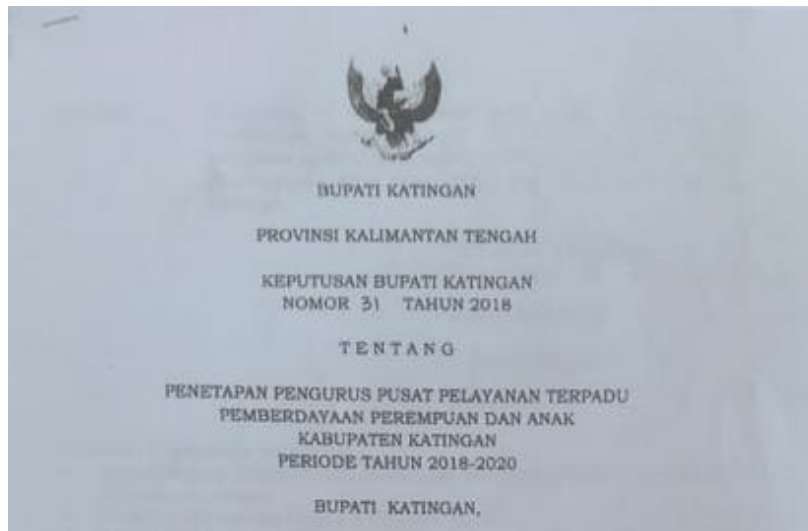


12.





13.



X. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani

No	Unit / Instansi	Kasus	Korban		Terlayani	
			Laki-Laki	Perempuan	% Laki-Laki	% Perempuan
1	Kabupaten Barito Selatan	7	1	100	100	100



2	Kabupaten Barito Timur	4	1	0	0	0
3	Kabupaten Barito Utara	13	5	53,9	75	20
4	Kabupaten Gunung Mas	2	2	50	0	50
5	Kabupaten Kapuas	13	6	35,7	25	50
6	Kabupaten Katingan	6	1	66,7	80	0
7	Kabupaten Kota Waringin Barat	0	0	0	0	0
8	Kabupaten Kota Waringin Timur	25	14	96	100	92,9
9	Kabupaten Lamandau	6	1	100	100	100
10	Kabupaten Murung Raya	2	0	0	0	0
11	Kabupaten Pulang Pisau	11	1	100	100	100
12	Kabupaten Seruyan	9	1	11,1	12,5	0
13	Kabupaten Sukamara	4	2	66,7	100	50
14	Kota Palangkaraya	31	17	100	100	100
	TOTAL	133	52	74,4	74,1	75

XI. Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapat pelatihan

-

XII. Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)

-

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

I. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan

- Tidak ada

II. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun

- MUKP = 19,6

III. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)

- ASFR = 53,0

IV. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)



$$\frac{205}{509,443} \times 100\% = 0,0004\%$$

**DATA KEGIATAN
PELAYANAN KIE**

NO	KABUPATEN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Barito Timur	-	-	-	-	46.849
2	Barito Selatan	-	-	-	-	78.799
3	Barito Utara	-	-	-	-	82.010
4	Murung Raya	-	-	-	-	36.767
5	Gunung Mas	-	-	-	-	33.754
6	Kapuas	75	-	-	75	41.590
7	Pulang Pisau	-	-	-	-	18.090
8	Katingan	-	65	65	130	10.068
9	Seruyan	-	-	-	-	19.453
10	Kotawaringin Timur	-	-	-	-	21.179
11	Kotawaringin Barat	-	-	-	-	30.303
12	Lamandau	-	-	-	-	16.339
13	Sukamara	-	-	-	-	26.251
14	Kota Palangka Raya	-	-	-	-	47.991
	JUMLAH	75	65	65	205	509.443

- V. Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK.
- BKKBN perwakilan Kalteng



VI. Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP

$$\frac{1471}{1869} \times 100\% = 78,70\%$$

CAKUPAN LAPORAN DAN TEMPAT PELAYANAN KB

KABUPATEN/KOTA SE KALIMANTAN TENGAH

BULAN : DESEMBER 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN			KLINIK KB PEMERINTAH			JALUR SWASTA									JEJARING FASKES KB LAINNYA			TOTAL TEMPAT		
		ADA	LAPOR	%	ADA	LAPOR	%	KLINIK KB SWASTA			DPS			BPS			ADA	LAPOR	%	ADA	LAPOR	%
								ADA	LAPOR	%	ADA	LAPOR	%	ADA	LAPOR	%						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Kotawaringin Barat	6	6	100,00	22	21	95,45	30	27	90,00	4	1	25,00	16	16	100,00	110	102	92,73	182	167	91,76
2	Kotawaringin Timur	17	17	100,00	47	45	95,74	9	9	100,00	-	-	#DIV/0!	77	20	25,97	94	69	73,40	227	143	63,00
3	Kapuas	17	12	70,59	26	18	69,23	-	-	#DIV/0!	2	-	-	13	9	69,23	122	79	64,75	163	106	65,03
4	Barito Selatan	6	6	100,00	14	14	100,00	1	1	100,00	-	-	#DIV/0!	9	9	100,00	35	35	100,00	59	59	100,00
5	Barito Utara	9	9	100,00	30	20	66,67	4	4	100,00	7	6	85,71	67	56	83,58	11	9	81,82	119	95	79,83
6	Katingan	13	13	100,00	17	17	100,00	-	-	#DIV/0!	10	9	90,00	27	22	81,48	118	115	97,46	172	163	94,77
7	Seruyan	10	9	90,00	14	13	92,86	10	9	90,00	-	-	#DIV/0!	6	6	100,00	63	57	90,48	93	85	91,40
8	Sukamara	5	5	100,00	7	5	71,43	-	-	#DIV/0!	1	1	100,00	6	6	100,00	29	29	100,00	43	41	95,35
9	Lamandau	8	6	75,00	12	7	58,33	2	2	100,00	6	2	33,33	21	2	9,52	93	56	60,22	134	69	51,49
10	Gunung Mas	12	12	100,00	18	18	100,00	-	-	#DIV/0!	19	7	36,84	89	63	70,79	69	43	62,32	195	131	67,18
11	Pulang Pisau	8	8	100,00	13	13	100,00	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	13	13	100,00	99	93	93,94	125	119	95,20
12	Murung Raya	10	10	100,00	16	16	100,00	3	2	66,67	-	-	#DIV/0!	2	2	100,00	109	109	100,00	130	129	99,23
13	Barito Timur	10	10	100,00	12	12	100,00	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	67	24	35,82	28	28	100,00	107	64	59,81
14	Kota Palangkaraya	5	5	100,00	18	15	83,33	59	42	71,19	3	3	100,00	1	1	100,00	39	39	100,00	120	100	83,33
KALTENG		136	128	94,12	266	234	87,97	118	96	81,36	52	29	55,77	414	249	60,14	1.019	863	84,69	1.869	1.471	78,71



VII. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

$$\frac{385,858}{487,739} \times 100\% = 79,11\%$$

PEMBINAAN PESERTA KB AKTIF PER MIX KONTRASEPSI DAN PREVALENSI PA/PUS SE KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2020 BULAN : DESEMBER 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	IUD	MOW	MOP	KDM	IMP	STK	PIL	JML	PPM PA	% PA/PPM	PUS	% PA THD PUS	SISA PUS (PUS - PA)
1	Kotawaringin Barat	586	620	47	498	2.140	15.140	6.576	25.607	40.304	63,53	39.225	65,28	13.618
2	Kotawaringin Timur	1.487	1.345	195	1.894	12.279	34.380	22.594	74.174	67.741	109,50	97.635	75,97	23.461
3	Kapuas	791	529	51	899	5.797	22.836	15.558	46.461	64.045	72,54	57.164	81,28	10.703
4	Barito Selatan	204	260	8	171	2.492	9.307	9.063	21.505	30.757	69,92	29.025	74,09	7.520
5	Barito Utara	260	333	25	391	2.158	10.264	9.028	22.459	25.317	88,71	25.325	88,68	2.866
6	Katingan	193	122	11	409	4.577	14.269	8.439	28.020	30.410	92,14	33.906	82,64	5.886
7	Seruyan	294	123	44	433	2.293	8.597	4.092	15.876	15.600	101,77	21.417	74,13	5.541
8	Sukamara	383	46	4	273	1.223	7.748	2.183	11.860	8.379	141,54	14.407	82,32	2.547
9	Lamandau	342	114	89	118	1.540	7.466	2.684	12.353	18.505	66,75	16.133	76,57	3.780
10	Gunung Mas	81	438	9	275	2.807	15.126	2.034	20.770	15.686	132,41	27.283	76,13	6.513
11	Pulang Pisau	211	400	6	1.375	2.716	11.482	6.000	22.190	23.848	93,05	25.835	85,89	3.645
12	Murung Raya	485	420	10	404	2.856	9.138	6.340	19.653	13.773	142,70	23.873	82,32	4.220
13	Barito Timur	463	260	9	199	2.542	6.972	8.318	18.763	20.321	92,33	23.516	79,79	4.753
14	Kota Palangkaraya	1.815	1.170	122	1.168	3.998	21.805	16.089	46.167	35.545	129,88	52.995	87,12	6.828
KALTENG		7.595	6.180	630	8.507	49.418	194.530	118.998	385.858	410.231	94,06	487.739	79,11	101.881
PPM PA PER MIX		10.910	10.635	491	6.369	46.831	221.203	113.792	410.231					



% PPM PA	69,62	58,11	128,31	133,57	105,52	87,94	104,58	94,06
----------	-------	-------	--------	--------	--------	-------	--------	-------



VIII. Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif
Jumlah = 131.004 Kelompok KKBPK Tahun 2020

KELOMPOK BKB, BKR DAN BKL PER KABUPATEN/KOTA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KABUPATEN/KOTA SE KALIMANTAN TENGAH

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KELUARGA YANG MENJADI SASARAN KELOMPOK KEGIATAN		
		BKB (Bina Keluarga Balita)	BKR (Bina Keluarga Remaja)	BKL (Bina Keluarga Lansia)
1	Kotawaringin Barat	2.250	708	1.610
2	Kotawaringin Timur	7.227	4.014	5.032
3	Kapuas	3.534	2.494	1.163
4	Barito Selatan	3.490	4.898	3.212
5	Barito Utara	3.239	2.001	1.762
6	Katingan	2.937	2.032	1.578
7	Seruyan	5.425	6.878	3.321
8	Sukamara	2.112	1.505	1.458
9	Lamandau	2.500	930	860
10	Gunung Mas	3.148	261	704
11	Pulang Pisau	2.886	7.458	1.680
12	Murung Raya	1.399	441	425
13	Barito Timur	6.659	7.187	3.597
14	Kota Palangkaraya	7.843	5.757	3.389
KALTENG		54.649	46.564	29.791





IX. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan

$$\frac{1708}{14.670} \times 100\% = 11,64\%$$

TOTAL PESERTA KB BARU PASCA PERSALINAN DAN KEGUGURAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2020

BULAN : DESEMBER 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOV	DES	JUMLAH DES '20
1	Kotawaringin Barat	110	140	156	203	154	205	243	250	302	247	278	254	2.542
2	Kotawaringin Timur	64	31	44	36	38	117	77	83	99	62	61	73	785
3	Kapuas	128	160	105	162	87	115	122	99	106	109	114	109	1.416
4	Barito Selatan	27	23	36	34	25	31	68	44	50	53	61	44	496
5	Barito Utara	99	61	52	63	66	89	56	103	80	94	89	73	925
6	Katingan	167	177	59	139	166	139	178	142	190	89	181	162	1.789
7	Seruyan	67	81	28	31	32	40	37	35	26	35	15	29	456
8	Sukamara	47	43	2	59	17	-	-	-	18	7	14	23	230
9	Lamandau	41	39	31	12	57	106	59	46	43	64	224	163	885
10	Gunung Mas	40	27	33	41	50	54	26	35	21	31	13	35	406
11	Pulang Pisau	51	73	90	88	90	96	128	119	94	124	154	120	1.227
12	Murung Raya	154	49	111	83	136	161	124	120	113	98	91	102	1.342
13	Barito Timur	65	76	92	88	86	119	72	76	87	81	56	100	998
14	Kota Palangkaraya	90	86	100	83	102	161	109	113	43	66	112	108	1.173
KALTENG		1.150	1.066	939	1.122	1.106	1.433	1.299	1.265	1.272	1.160	1.463	1.395	14.670



**TOTAL PESERTA KB BARU PASCA PERSALINAN DAN KEGUGURAN MKJP
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2020**

BULAN : DESEMBER 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOV	DES	JUMLAH DES '20
1	Kotawaringin Barat	9	16	19	14	8	24	19	24	26	13	17	7	196
2	Kotawaringin Timur	10	-	21	3	2	38	9	6	17	8	10	8	132
3	Kapuas	14	3	9	6	1	26	8	2	5	6	4	6	90
4	Barito Selatan	-	3	16	3	3	12	5	1	2	17	-	4	66
5	Barito Utara	9	2	-	3	3	4	2	5	4	6	6	4	48
6	Katingan	15	8	3	3	9	35	16	8	6	8	25	6	142
7	Seruyan	23	7	17	11	12	14	13	14	4	7	3	7	132
8	Sukamara	2	8	-	1	-	-	-	-	3	1	-	1	16
9	Lamandau	12	22	3	-	12	44	4	15	16	13	31	4	176
10	Gunung Mas	4	8	2	-	2	7	5	8	-	5	2	12	55
11	Pulang Pisau	-	6	4	3	2	13	14	14	9	19	15	14	113
12	Murung Raya	11	1	10	-	-	24	1	14	3	14	7	11	96
13	Barito Timur	6	6	9	11	16	43	15	19	29	11	18	16	199
14	Kota Palangkaraya	20	22	17	15	24	41	25	22	4	12	24	21	247
KALTENG		135	112	130	73	94	325	136	152	128	140	162	121	1.708



X. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah

$$\frac{0}{14} \times 100\% = 0\%$$

**PEMBINAAN PESERTA KB AKTIF PER MIX KONTRASEPSI DAN PREVALENSI PA/PUS
SE KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2020
BULAN : DESEMBER 2020**

NO	KABUPATEN/KOTA	IUD	MOW	MOP	KDM	IMP	STK	PIL	JML	PPM PA	% PA/PPM	PUS	% PA THD PUS	SISA PUS (PUS - PA)
1	Kotawaringin Barat	586	620	47	498	2.140	15.140	6.576	25.607	40.304	63,53	39.225	65,28	13.618
2	Kotawaringin Timur	1.487	1.345	195	1.894	12.279	34.380	22.594	74.174	67.741	109,50	97.635	75,97	23.461
3	Kapuas	791	529	51	899	5.797	22.836	15.558	46.461	64.045	72,54	57.164	81,28	10.703
4	Barito Selatan	204	260	8	171	2.492	9.307	9.063	21.505	30.757	69,92	29.025	74,09	7.520
5	Barito Utara	260	333	25	391	2.158	10.264	9.028	22.459	25.317	88,71	25.325	88,68	2.866
6	Katingan	193	122	11	409	4.577	14.269	8.439	28.020	30.410	92,14	33.906	82,64	5.886
7	Seruyan	294	123	44	433	2.293	8.597	4.092	15.876	15.600	101,77	21.417	74,13	5.541
8	Sukamara	383	46	4	273	1.223	7.748	2.183	11.860	8.379	141,54	14.407	82,32	2.547
9	Lamandau	342	114	89	118	1.540	7.466	2.684	12.353	18.505	66,75	16.133	76,57	3.780
10	Gunung Mas	81	438	9	275	2.807	15.126	2.034	20.770	15.686	132,41	27.283	76,13	6.513
11	Pulang Pisau	211	400	6	1.375	2.716	11.482	6.000	22.190	23.848	93,05	25.835	85,89	3.645
12	Murung Raya	485	420	10	404	2.856	9.138	6.340	19.653	13.773	142,70	23.873	82,32	4.220
13	Barito Timur	463	260	9	199	2.542	6.972	8.318	18.763	20.321	92,33	23.516	79,79	4.753
14	Kota Palangkaraya	1.815	1.170	122	1.168	3.998	21.805	16.089	46.167	35.545	129,88	52.995	87,12	6.828
KALTENG		7.595	6.180	630	8.507	49.418	194.530	118.998	385.858	410.231	94,06	487.739	79,11	101.881
PPM PA PER MIX		10.910	10.635	491	6.369	46.831	221.203	113.792	410.231					



% PPM PA	69,62	58,11	128,31	133,57	105,52	87,94	104,58	94,06
----------	-------	-------	--------	--------	--------	-------	--------	-------



XI. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)

$$\frac{9.579}{509,443} \times 100\% = 1,88\%$$

TOTAL PESERTA KB BARU JKN MKJP

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2020

BULAN : DESEMBER 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOV	DES	JUMLAH DES '20
1	Kotawaringin Barat	9	23	22	16	12	77	31	14	10	10	20	2	246
2	Kotawaringin Timur	4	49	4	7	2	38	4	7	16	11	15	2	159
3	Kapuas	9	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	15
4	Barito Selatan	5	3	68	34	16	61	5	3	64	41	8	4	312
5	Barito Utara	8	2	1	3	5	9	14	3	6	20	8	6	85
6	Katingan	7	9	4	4	6	42	18	6	1	3	5	3	108
7	Seruyan	3	1	17	10	3	11	11	12	2	2	1	12	85
8	Sukamara	5	8	4	2	1	10	-	6	16	2	-	1	55
9	Lamandau	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
10	Gunung Mas	1	-	-	1	-	2	3	-	-	-	2	-	9
11	Pulang Pisau	1	1	4	-	3	8	-	1	2	3	3	2	28
12	Murung Raya	11	1	26	-	-	24	15	59	21	14	9	11	191
13	Barito Timur	6	14	8	9	11	13	14	12	13	6	11	16	133
14	Kota Palangkaraya	18	22	15	13	21	12	16	17	4	7	17	14	176
KALTENG		87	133	173	99	80	313	131	140	156	119	99	73	1.603



TOTAL PESERTA KB BARU JKN NON MKJP

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2020

BULAN : DESEMBER 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOV	DES	JUMLAH DES '20
1	Kotawaringin Barat	9	45	100	64	86	44	36	5	44	27	15	51	526
2	Kotawaringin Timur	71	101	62	48	45	49	57	28	49	30	48	23	611
3	Kapuas	27	33	28	29	38	39	47	32	27	31	34	26	391
4	Barito Selatan	69	80	125	97	72	127	88	85	96	57	80	86	1.062
5	Barito Utara	50	43	44	107	78	108	86	115	66	139	113	99	1.048
6	Katingan	55	58	45	123	30	39	66	42	119	35	49	30	691
7	Seruyan	16	4	5	-	-	12	13	16	9	9	12	23	119
8	Sukamara	62	49	59	64	78	47	53	32	42	58	45	52	641
9	Lamandau	-	-	-	8	-	-	-	-	4	-	-	-	12
10	Gunung Mas	18	10	2	21	2	3	8	3	12	2	6	8	95
11	Pulang Pisau	12	49	36	53	48	120	67	67	81	74	60	78	745
12	Murung Raya	146	53	116	104	147	94	135	138	144	102	105	104	1.388
13	Barito Timur	29	21	42	17	18	15	26	21	18	30	3	19	259
14	Kota Palangkaraya	42	51	32	36	19	33	13	37	38	17	40	30	388
KALTENG		606	597	696	771	661	730	695	621	749	611	610	629	7.976

**DATA KEGIATAN
PELAYANAN KIE**

NO	KABUPATEN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Barito Timur	-	-	-	-	46.849
2	Barito Selatan	-	-	-	-	78.799
3	Barito Utara	-	-	-	-	82.010
4	Murung Raya	-	-	-	-	36.767
5	Gunung Mas	-	-	-	-	33.754
6	Kapuas	75	-	-	75	41.590
7	Pulang Pisau	-	-	-	-	18.090
8	Katingan	-	65	65	130	10.068
9	Seruyan	-	-	-	-	19.453
10	Kotawaringin Timur	-	-	-	-	21.179
11	Kotawaringin Barat	-	-	-	-	30.303
12	Lamandau	-	-	-	-	16.339
13	Sukamara	-	-	-	-	26.251
14	Kota Palangka Raya	-	-	-	-	47.991
	JUMLAH	75	65	65	205	509.443

KEPALA DINAS DP3APPKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19630527 199102 1 001